**PEMERINTAH SEDIAKAN THR UNTUK ASN, TNI DAN POLRI
GOLONGAN 1 HINGGA 3**



https://www.google.com/search

Jakarta (Inside Lombok) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah pada tahun ini sudah menyediakan dana anggaran Tunjangan Hari Raya[[1]](#endnote-1) (THR) untuk TNI dan Polri serta Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan 1, 2 dan 3. “Gaji ke-13 dan THR sudah kami usulkan ke Presiden yang akan diputuskan sidang kabinet. Perhitungan untuk ASN, TNI, Polri terutama kelompok pelaksana golongan 1, 2, 3 ASN, TNI, Polri, THR-nya sudah disediakan,” kata Sri Mulyani di kantornya di Jakarta, Selasa.

Pernyataan Sri Mulyani disampaikan melalui konferensi video setelah mengikuti rapat terbatas dengan tema “Efektivitas Penyaluran Program Jaring Pengaman Sosial” dan “Percepatan Program Padat Karya Tunai” yang dipimpin Presiden Joko Widodo. “Sedangkan untuk pejabat negara nanti Presiden akan menetapkan seperti menteri, anggota DPR dan para pejabat termasuk eselon 1 dan 2. Jadi kami akan menyampaikan ke Presiden, Presiden masih minta instruksi kalkulasi difinalkan agar diputuskan presiden dalam minggu-minggu ke depan,” tambah Sri Mulyani.

Sebelumnya Sri Mulyani menyampaikan proyeksi pendapatan negara sebesar Rp1.760,9 triliun dari target APBN 2020 sebesar Rp2.233,2 triliun. Sedangkan dari sisi belanja negara, ia mengatakan mengalami kenaikan menjadi Rp2.613,8 triliun dari APBN sebesar Rp2.540,4 triliun. Dengan proyeksi pendapatan dan belanja negara tersebut, menurut Sri Mulyani, berdampak pada pelebaran defisit APBN menjadi Rp853 triliun atau 5,07 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Angka defisit naik dari target dalam APBN 2020 sebesar Rp307,2 triliun atau 1,76 persen dari PDB. Pada awal April 2019 lalu, pemerintah memberikan kenaikan gaji ASN sebesar 5 persen

Bila mengacu gaji terbaru dalam PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS, untuk ASN golongan III A masa kerja 0 tahun yang biasanya merupakan jabatan untuk lulusan baru bagi sarjana maka akan mendapat THR senilai gaji pokok yakni Rp 2.579.400. Besaran THR yang diterima PNS berbeda setiap jabatan, golongan, dan masa kerja. Semua itu tergantung dari gaji pokok yang diterima oleh masing-masing ASN. (Ant)

**Sumber Berita**

1. https://insidelombok.id/nasional/pemerintah-sediakan-thr-untuk-asn-tni-dan-polri-golongan-1-hingga-3/ /08/04/2020
2. https://www.antaranews.com/berita/1408202/pemerintah-sediakan-thr-untuk-asn-tni-dan-polri-golongan-1-hingga-3/ 07/04/2020

**Catatan**

Ditengah kodinsi bernegara saat ini yang mengalami defisit penerimaan pendapatan, ditengah pandemi virus corona Covid-19, membuat pemerintah selaku penyelanggara negara harus berhitung dan memikirkan kembali politik anggaran yang akan dilaksanakan dalam APBN 2020. Pergeseran kebutuhan dan alokasi yang diluar rencana yang telah disusun dalam APBN 2020 tentunya akan mengeser dan menghitung ulang anggaran guna bisa merespon apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Salah satu sektor yang mengalami kesulitan dan ketidak jelasan akibat pandemic ini adala sektor usaha dan masyarakat tidak berpenghasilan tetap atau teak menentu. Lalu ditengah kondisi seperti ini apakah urgensi pemberian THR dan Gaji[[2]](#endnote-2) 13 perlu di tinjau ataukah justru hal tersebut justur wajib untuj diberikan ditengan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang menurun.

Melihat kondisi saat ini semua lembaga baik pemerintahan maupun swasta terlebih masyarakat kecil tentunnya mendapat masal yang sama, dan tentunnya semua harus mendapatkan solusi dan porsi yang tepat hingga tidak ada yang akan dirugikan. Kebijakan PSBB akan banyak menimbulkan efeck domino tidak saja bagi ASN dan Pejabat penyelenggara negara tapi tentunya seluruh komponen harus baru membahu untuk bersatu mencari solusi agar pesoalan ini segera teratasi. Pada saat ini pemberian THR ataupun Gaji 13 menjadi suatu yang urgen untuk mempertahkan atau survive ditengah adanya resesi akibat pandemic ini. Untuk besaran dan mekanisme pemerintah harus bisa bijak dalam menentukan kalkulasinya sehingga diharapkan defisit APBN tetap terjaga dan tidak menjadi bumeranng bagi pemerintah. Kebijkan perlu nya kajian untuk pejabat penyelengara negara itu patus untuk dipertimbangkan seperti banyak dilakukan oleh-oleh negara yang mengalami hal yang sama dengan Indonesia.

**Catatan Akhir/Endnote**

1. tunjangan/tun·jang·an/ v uang (barang) yang dipakai untuk menunjang; tambahan pendapatan di luar gaji sebagai bantuan; sokongan; bantuan;~ anak tambahan gaji sebagai bantuan untuk anak; ~ fungsional tunjangan profesi (seperti peneliti dan dokter) yang diberikan kepada pegawai negeri sesuai dengan pangkatnya; ~ istri tunjangan untuk istri; ~ kemahalan tambahan gaji sebagai bantuan untuk kemahalan (kenaikan harga keperluan sehari-hari); ~ perceraian tunjangan yang wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya berdasarkan ketentuan hukum yang ada; ~ struktural tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang menduduki jabatan tertentu; ~ tahunan tunjangan yang diberikan secara tahunan dalam ukuran kualitas atau kuantitas[vide: https://kbbi.web.id/tunjang] [↑](#endnote-ref-1)
2. aji/ga·ji/ n 1 upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap; 2 balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu;[vide https://kbbi.web.id/gaji] [↑](#endnote-ref-2)